



BPK Puji Pemprov Kalbar

Enam Kali Raih Opini WTP

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian ini merupakan prestasi keenam secara berturut-turut yang diterima oleh Pemprov Kalbar.

Penyerahan laporan dilakukan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Provinsi, Kalbar Rita Amelia kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji dan pimpinan DPRD Kalbar saat Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Kamis (31/5).

Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

"Pemprov Kalbar telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan. Atas itu semua, BPK RI memberi opini Wajar Tan-



pa Pengecualian atau WTP,” ungkapnya.

Ia pun memuji pencapaian opini WTP ini, karena menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

“Pencapaian itu tidak terlepas dari sinergi efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Kalbar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” terangnya.

Kendati meraih opini WTP, kata Azhar, BPK masih mencatat beberapa permasalahan administrasi yang harus jadi atensi Pemprov Kalbar. Problem itu yakni pengelolaan persediaan Provinsi Kalbar belum sepenuhnya tertib.

Catatan lainnya, pengelolaan barang milik daerah Provinsi Kalbar belum memadai. “Penataan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalbar juga masih belum tertib dan harus dibenahi,” paparnya.

Harry Azhar menambahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 yang diserahkan terdiri dari tiga laporan yakni LHP atas LKPD Tahun 2017, LHP atas SPI dan LHP atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.



LAPORAN - Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2017 kepada Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, di Ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Kamis (31/5).

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji bersyukur atas pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. “Pemprov Kalbar masuk opini WTP untuk keenam kali berturut-turut,” ungkapnya, saat diwawancarai awak media usai Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar.

Dodi menitikberatkan pada catatan yang disampaikan BPK RI terkait angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar lantaran masih di bawah angka rata-rata nasional. “Angka nasional 70, tapi kita baru 66,” terangnya.

Ia menambahkan hal yang jadi atensi khusus adalah masalah tindak lanjut temuan dan catatan BPK yang

sudah ada koridornya bahwa harus selesai dalam waktu 60 hari. “Itu sudah harus diselesaikan. Karena kalau lewat 60 hari maka masuk ranah hukum. Itu catatan khusus dan harus jadi perhatian kita,” katanya.

Khusus IPM, ia menyoroti ada beberapa indikator yang memengaruhi. Kalbar mempunyai sumber daya manusia (SDM) cukup mulai dari anak-anak sampai usia produktif. “Penduduk usia produktif kiranya akan mampu mengeluarkan energi untuk memproduksi barang dan jasa. Bukan hanya sekadar mengonsumsi saja. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu merangsang penduduk Kalbar untuk memperoleh pekerjaan layak dan produktivitas akan tinggi,” ujarnya. (pra)